

INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI GORONTALO

2016



<https://gorontalo.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI GORONTALO



INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI GORONTALO

2016

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI GORONTALO 2016

ISBN : 978-602-74780-4-6
Katalog BPS : 4102004.75
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xiv+ 54 halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Provinsi Gorontalo

Gambar Kulit:

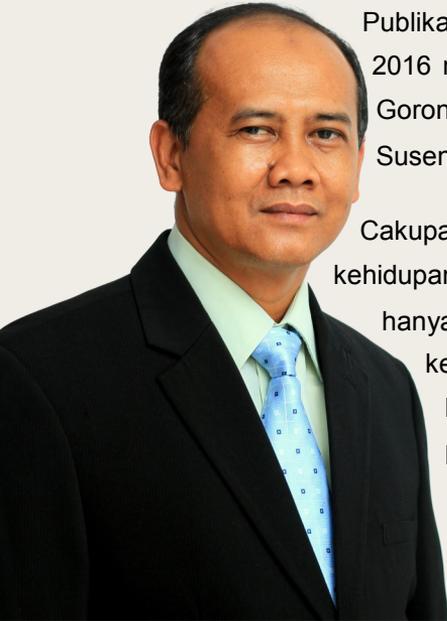
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Provinsi Gorontalo

Sumber Ilustrasi:

1000 Guru Gorontalo

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

KATA PENGANTAR



Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Provinsi Gorontalo 2016 menyajikan informasi tentang kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo tahun 2016. Data yang disajikan bersumber dari hasil Susenas, Sakernas dan Proyeksi Penduduk.

Cakupan kesejahteraan rakyat sangat luas, mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat yang tidak semuanya dapat diukur. Publikasi ini hanya menyajikan dimensi-dimensi yang dapat diukur berdasarkan ketersediaan data yang meliputi beberapa aspek: Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Perumahan, dan Pengeluaran Rumah Tangga.

Publikasi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pengguna data. Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini. Saran dan kritik kami harapkan demi perbaikan publikasi serupa di masa yang akan datang.

Gorontalo, November 2017

Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Gorontalo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eko Marsoro', with a horizontal line underneath.

Eko Marsoro

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR ISTILAH	xi
BAB 1 KEPENDUDUKAN	1
BAB 2 KESEHATAN	11
BAB 3 PENDIDIKAN	23
BAB 4 KETENAGAKERJAAN	35
BAB 5 POLA KONSUMSI	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan <i>Sex Ratio</i> Provinsi Gorontalo, 2016	7
Tabel 2.1	Persentase Anak Usia 0-23 Bulan yang Pernah Diberi ASI menurut Rata-rata Lama Pemberian ASI (bulan) dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (persen), 2016	20
Tabel 3.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Gorontalo (persen), 2016	32
Tabel 3.2	Indeks Gini Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas menurut Klasifikasi Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2016	34
Tabel 4.1	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu (orang), 2015- 2016	37
Tabel 4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2016	39
Tabel 4.3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Provinsi Gorontalo, 2015-2016	46
Tabel 5.1	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran di Provinsi Gorontalo (rupiah), 2016	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Provinsi di Indonesia (ribu jiwa), 2016	4
Gambar 1.2	Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo menurut Jenis Kelamin (jiwa), 2010-2016	5
Gambar 1.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo dan Indonesia (persen), 2010--2016	6
Gambar 1.4	Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Gorontalo menurut Kabupaten/ Kota (persen), 2016	6
Gambar 1.5	Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Gorontalo, 2010--2016	8
Gambar 2.1	Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo dan Indonesia (tahun), 2010-2016	14
Gambar 2.2	Angka Kematian Bayi Provinsi Gorontalo dan Indonesia, 2010-2016	15
Gambar 2.3	Angka Kesakitan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (persen), 2016	16
Gambar 2.4	Rata-rata Lama Sakit Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (hari), 2016	17
Gambar 2.5	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Tempat Berobat Jalan (persen), 2016	18
Gambar 2.6	Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir Dalam 2 Tahun Terakhir (persen), 2016	19
Gambar 2.7	Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Kabupaten/Kota (persen), 2016	21
Gambar 3.1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin di Indonesia (tahun), 2010-2015	27
Gambar 3.2	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas menurut Provinsi (Tahun), 2010 dan 2016	28
Gambar 3.3	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Provinsi Gorontalo (tahun) dan Pertumbuhannya (persen), 2010-2016	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.4	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (Tahun), 2010 dan 2016	30
Gambar 3.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2016	31
Gambar 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo (persen), 2015-2016	40
Gambar 4.2	Tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tipe Daerah Tempat Tinggal (persen), 2015-2016	41
Gambar 4.3	Tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin (persen), 2015-2016	41
Gambar 4.4	Jumlah Angkatan Kerja menurut Jenis Kegiatan dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan , 2015-2016	42
Gambar 4.5	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah Tempat Tinggal (persen), 2016	43
Gambar 4.6	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama (persen), 2013-2016	44
Gambar 4.7	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan (orang), 2015-2016	45
Gambar 5.1	Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Provinsi Gorontalo, 2016	50
Gambar 5.2	Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Gorontalo, 2016	51
Gambar 5.3	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (rupiah), 2016 ...	52

DAFTAR ISTILAH

Penduduk

Semua orang yang berdomisili di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per km².

Angka Harapan Hidup

Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka Ketergantungan

Banyaknya penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Angka Kesakitan (Morbiditas)

Proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga menyebabkan aktifitas sehari-harinya terganggu.

Rata-rata Lama Sakit

Rata-rata (jumlah hari) lamanya penduduk mengalami keluhan kesehatan sehingga aktifitas sehari-harinya terganggu.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka besarnya partisipasi penduduk yang bersekolah menurut jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka besarnya partisipasi penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usia jenjang pendidikan tersebut.

Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase pengangguran terhadap angkatan kerja.

Bekerja

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Termasuk di dalamnya, pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja

Keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dsb.

Pengangguran Terbuka

Terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha/tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pekerja tidak penuh

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), terdiri dari :

- ⇒ **Setengah Penganggur** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- ⇒ **Pekerja Paruh Waktu** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Air Minum Bersih

Air yang bersumber dari leding, air kemasan, serta pompa, susmur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (*septic tank*) \geq 10 meter.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakai dan sirih; sedangkan bukan makanan mencakup perumahan, sandang, kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

<https://gornontalo.bps.go.id>

KEPENDUDUKAN | 1



KEPENDUDUKAN 1

Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo sedang giat-giatnya melaksanakan berbagai macam program pembangunan. Banyak faktor yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya adalah kapasitas sumber daya manusia (penduduk). Tidak dapat dipungkiri bahwa modal manusia atau penduduk sangat berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pasalnya, penduduk merupakan penggerak utama dalam pembangunan. Modal manusia merupakan terminologi yang mengacu kepada pengembangan kapasitas manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi lainnya. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tentu akan meningkatkan produktivitas yang berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi.

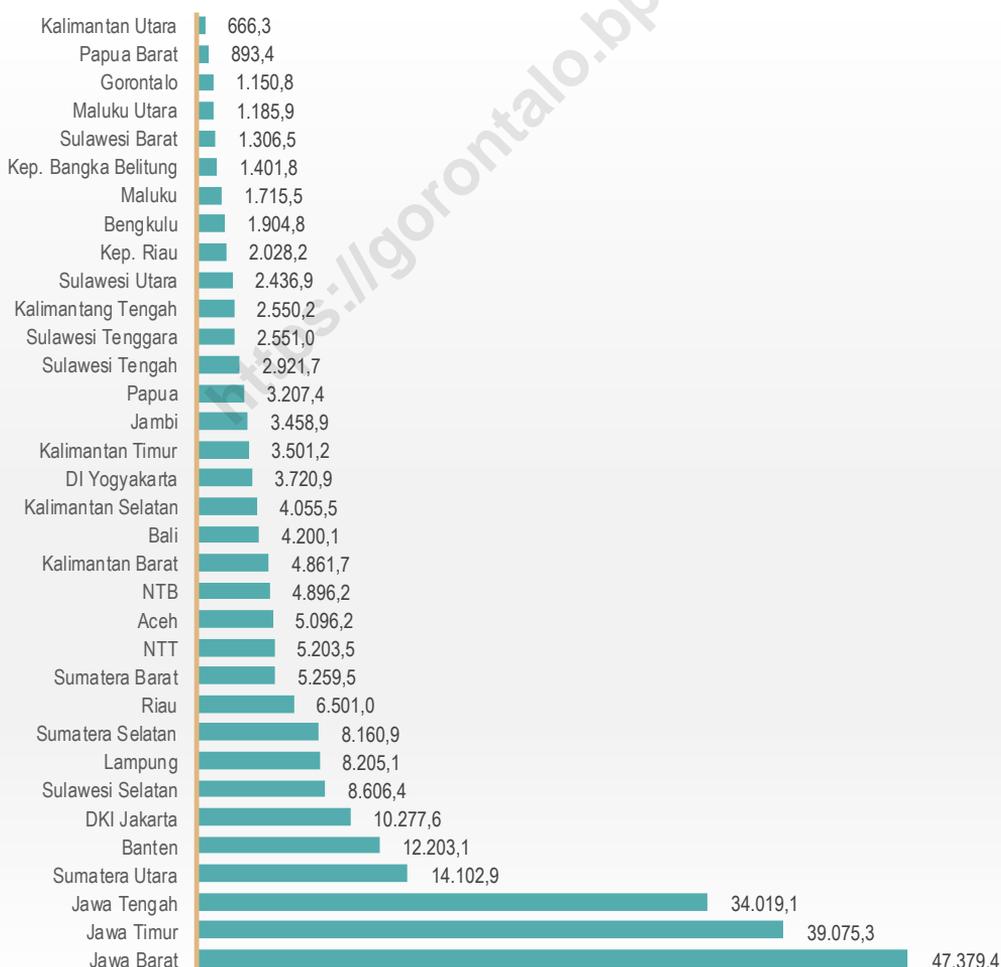
Perkembangan mengenai kapasitas penduduk dapat diukur melalui berbagai indikator kependudukan. Oleh karenanya, pemerintah sangat memerlukan data kependudukan dalam menentukan arah kebijakan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Data yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu kebijakan tersebut disusun, tetapi juga informasi masa lampau dan yang lebih penting lagi adalah informasi perkiraan pada waktu yang akan datang. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data, berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan melakukan perhitungan proyeksi data kependudukan dari hasil Sensus Penduduk (SP).

1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara umum, persebaran penduduk di Indonesia belum merata. Hampir setengah dari penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Sementara setengahnya lagi relatif merata tersebar di pulau lain di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, jumlah penduduk Gorontalo tergolong kecil. Jumlahnya bahkan menempati urutan ketiga terkecil se-Indonesia, setelah Kalimantan Utara dan Papua Barat. Jumlah penduduk Gorontalo yang sebanyak 1.150.765 jiwa hanya mencapai 0,44 persen terhadap total penduduk Indonesia.

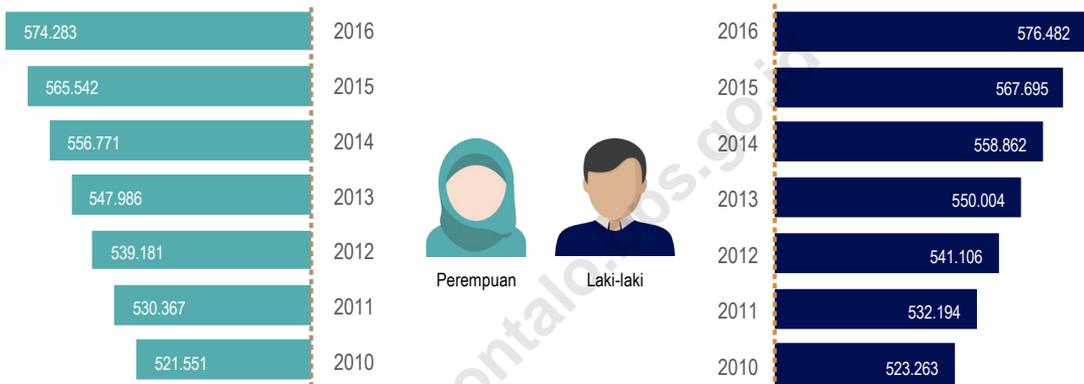
Gambar 1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Provinsi di Indonesia (ribu jiwa), 2016



Sumber: Proyeksi SP2010-2035, BPS Provinsi Gorontalo

Berdasarkan hasil proyeksi SP2010, jumlah penduduk Gorontalo tahun 2016 adalah sebanyak 1.150.765 jiwa. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 17.528 jiwa jika dibandingkan jumlah penduduk Gorontalo tahun 2010 yang sebanyak 1.044.814 jiwa. Proporsi antara penduduk laki-laki dan perempuan pun hampir seimbang, dimana jumlah penduduk laki-laki adalah 582.210 jiwa dan perempuan sebanyak 582.980 jiwa.

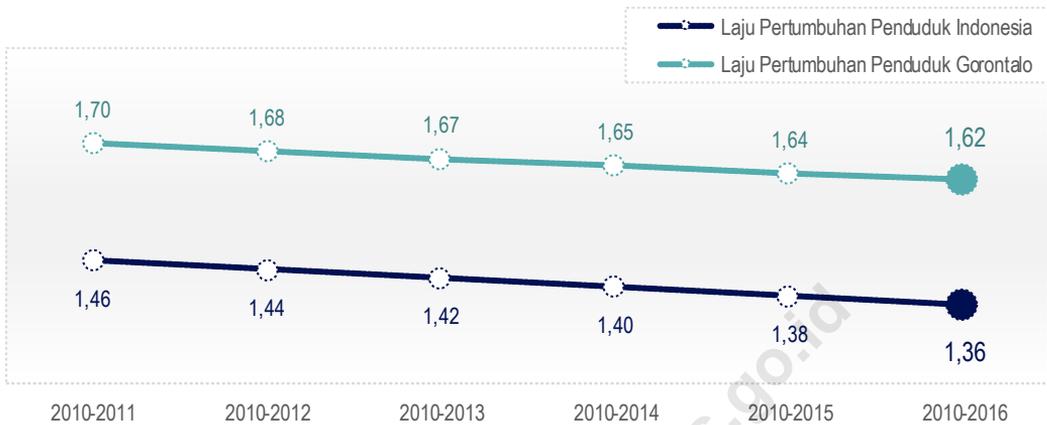
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo menurut Jenis Kelamin (jiwa), 2010-2016



Sumber: Proyeksi SP2010-2035, BPS Provinsi Gorontalo

Meskipun hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Gorontalo terus meningkat, namun laju pertumbuhannya cenderung menurun. Selama periode 2010-2017, laju pertumbuhan penduduk Gorontalo turun dari 1,70 persen menjadi 1,61 persen. Tidak hanya di Gorontalo, kondisi tersebut secara umum juga terjadi di tingkat nasional. Dalam periode yang sama, laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurun dari 1,38 persen menjadi 0,62 persen. Hal ini terjadi karena tingkat kematian dan kelahiran pada dua dekade mendatang juga diproyeksikan menurun. Namun, tingkat penurunan kelahiran lebih cepat daripada turunnya tingkat kematian menyebabkan pertumbuhan penduduk menjadi melambat.

Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo dan Indonesia (persen), 2010–2016

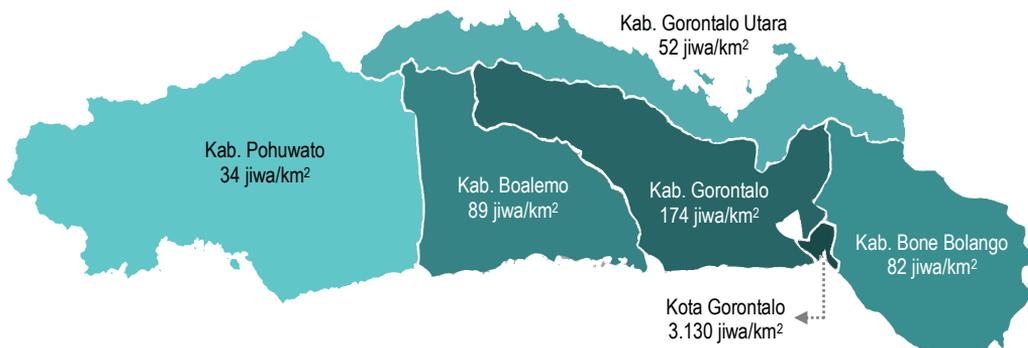


Sumber: Proyeksi SP2010-2035, BPS Provinsi Gorontalo

1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk antarkabupaten di Provinsi Gorontalo relatif belum merata. Tercermin dari distribusi dan kepadatan penduduk pada tiap kabupaten yang beragam. Sebagian besar penduduk Gorontalo tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo. Tercatat, sepertiga dari penduduk Provinsi Gorontalo tinggal di wilayah ini. Namun, dengan luas wilayah yang cukup besar, menjadikan wilayah ini tidak sepadat di Kota Gorontalo. Kota Gorontalo dengan wilayah terkecil (hanya 0,53% terhadap luas total provinsi) dihuni oleh sekitar 206.454 jiwa penduduk, menjadikannya sebagai wilayah terpadat di Provinsi Gorontalo dengan tingkat kepadatan sebesar 3.130 jiwa/km².

Gambar 1.4 Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Gorontalo menurut Kabupaten/Kota (persen), 2016



Sumber: Proyeksi SP2010-2035, BPS Provinsi Gorontalo

1.3 Rasio Jenis Kelamin

Secara umum, rasio jenis kelamin penduduk Gorontalo relatif seimbang. Dalam kurun 2010-2016 rasionya hanya berkisar 100,33-100,38. Ini berarti jumlah penduduk laki-laki di Gorontalo hanya sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuannya.

Jika dicermati berdasarkan kelompok umur, terdapat beberapa pola rasio jenis kelamin yang menarik. Pada kelompok umur 0-19 tahun, rasio jenis kelamin bernilai di atas 100. Ini berarti jumlah penduduk laki-laki pada kelompok umur tersebut lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Namun, pada kelompok umur 55-75 tahun ke atas rasio jenis kelamin bernilai di bawah 100 yang berarti bahwa penduduk perempuan melebihi jumlah penduduk laki-laki. Secara tidak langsung, kondisi ini mengindikasikan bahwa penduduk perempuan cenderung lebih panjang umur dibandingkan penduduk laki-laki, tampak pula dari angka harapan hidup perempuan yang selalu di atas laki-laki.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Provinsi Gorontalo, 2016

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)		Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	56.579	54.386	104,03
5-9	54.792	52.091	105,19
10-14	54.023	51.481	104,94
15-19	54.773	53.364	102,64
20-24	53.124	53.513	99,27
25-29	48.157	48.383	99,53
30-34	44.129	44.571	99,01
35-39	43.487	43.730	99,44
40-44	41.722	41.143	101,41
45-49	36.087	35.411	101,91
50-54	28.653	28.651	100,01
55-59	22.006	22.514	97,74
60-64	16.240	16.937	95,88
65-69	10.855	12.242	88,67
70-75	6.452	7.851	82,18
75+	5.403	8.015	67,41
Jumlah	576.482	574.283	100,38

Sumber: Proyeksi SP2010-2035, BPS Provinsi Gorontalo

1.4 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk produktif (15-64 tahun). Indikator ini dapat memberikan gambaran kasar beban ekonomi yang dihadapi oleh suatu populasi. Rasio ketergantungan secara umum memperlihatkan seberapa banyak penduduk usia tidak produktif yang menjadi beban tanggungan bagi penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif. Sebaliknya, semakin rendah rasio ketergantungan, maka beban ekonomi yang ditanggung penduduk usia produktif pun semakin rendah.

Berdasarkan hasil proyeksi SP2010, rasio ketergantungan Gorontalo cenderung menurun selama enam tahun terakhir. Di tahun 2010, rasio ketergantungan Gorontalo adalah sebesar 51,75, menurun menjadi 48,18 di tahun 2016. Capaian sebesar 48,18 memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Gorontalo menanggung sekitar 48 hingga 49 penduduk usia tidak produktif. Dengan kata lain, setiap dua orang penduduk usia produktif hanya akan menanggung satu orang usia non produktif.

Gambar 1.5 Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Gorontalo, 2010–2016



Sumber: Proyeksi SP2010-2035, BPS Provinsi Gorontalo



Relatif rendahnya rasio ketergantungan penduduk tersebut menunjukkan bahwa saat ini Gorontalo sedang menikmati “Bonus Demografi”. Bonus demografi merupakan suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Kondisi ini akan sangat menguntungkan jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Melimpahnya jumlah penduduk usia produktif merupakan modal dasar yang berharga bagi roda perekonomian dengan catatan bahwa modal dasar tersebut dipoles lebih lanjut lewat pembangunan pendidikan dan keterampilan. Hasil akhir dari proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tidak saja mumpuni dari segi jumlah namun juga dari segi kualitas. Pada akhirnya, dengan meningkatnya produktivitas penduduk, tentu akan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

<https://gorontalo.bps.go.id>

KESEHATAN | 2



KESEHATAN

2

Pembangunan kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tingkat kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Berbagai program dan kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, serta terjangkau. Pelayanan yang diberikan meliputi memberikan pelayanan gratis bagi penduduk miskin, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau masyarakat. Sasaran utama kemudahan akses ini adalah untuk menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan derajat kesehatan penduduk di suatu wilayah. Beberapa indikator yang dinilai peka terhadap ukuran derajat kesehatan suatu daerah adalah Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

AHH merupakan indikator yang mewakili dimensi kesehatan dalam pengukuran keberhasilan pembangunan manusia (Indeks Pembangunan Manusia—IPM). Asumsinya, semakin tinggi tingkat harapan hidup penduduk suatu wilayah, maka semakin baik pula tingkat pembangunan kesehatan di wilayah tersebut. AHH pada saat lahir (*life expectancy at birth*) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo dan Indonesia (tahun), 2010-2016



Sumber: Susenas, BPS Provinsi Gorontalo

Secara umum, AHH di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, capaiannya bertambah 1,09 poin. Pada tahun 2016 AHH Indonesia tercatat mencapai 70,90 tahun. Artinya, rata-rata bayi baru lahir di Indonesia memiliki harapan hidup hingga 70,90 tahun.

Peningkatan AHH juga terjadi di Provinsi Gorontalo. Meskipun capaian AHH Gorontalo masih di bawah capaian nasional, namun capaiannya juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian tersebut meningkat seiring dengan giatnya pembangunan kesehatan

oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2010, seorang bayi yang baru lahir di Gorontalo memiliki harapan hidup selama 66,41 tahun. Di tahun 2016, harapan hidup bayi yang baru di Gorontalo tercatat lebih panjang, yaitu sekitar 67,13 tahun.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi harapan hidup penduduk di suatu wilayah, salah satunya adalah angka kematian bayi. AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 hingga kurang 1 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Dengan kata lain, AKB merupakan probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan indikator AHH. Semakin tinggi AKB, maka akan menurunkan AHH suatu daerah.

Tingginya kematian bayi menunjukkan rendahnya status kesehatan ibu dan bayi. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya selama masa persalinan. Selain itu, kematian bayi juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran berperilaku hidup sehat ibu hamil, keluarga, dan masyarakat.

Hasil proyeksi SP2010 menunjukkan bahwa dalam kurun 2010-2016 angka kematian bayi di Gorontalo mengalami penurunan. Hasil sensus penduduk tahun 2010 mencatat bahwa angka kematian bayi di Gorontalo adalah sebesar 40,7. Artinya, dari setiap 1.000 bayi lahir hidup, terdapat 40 hingga 41 bayi usia kurang dari satu tahun meninggal. Di tahun 2016, jumlahnya menurun menjadi 36,7 yang berarti bahwa dari 1.000 bayi lahir hidup, terdapat sekitar 36 hingga 37 bayi usia kurang dari 1 tahun yang meninggal.

Gambar 2.2 Angka Kematian Bayi Provinsi Gorontalo dan Indonesia, 2010-2016



Sumber: Susenas, BPS Provinsi Gorontalo

Ukuran lain yang dapat menggambarkan derajat kesehatan penduduk suatu daerah adalah indikator Morbiditas (angka kesakitan). Merujuk pada konsep yang diterapkan BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), morbiditas menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Angka kesakitan yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya penduduk yang mengalami gangguan kesehatan. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut.

Hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa angka kesakitan penduduk Gorontalo mencapai 19,98 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 20,88 persen. Angka kesakitan sebesar 19,98 persen menunjukkan bahwa terdapat sekitar 19,98 persen penduduk Gorontalo yang mengalami gangguan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari mereka (referensi waktu pencacahan satu bulan terakhir).

Pada level kabupaten/kota, angka kesakitan menunjukkan angka yang beragam. Angka kesakitan terendah terjadi di Kota Gorontalo, dimana sekitar 16,66 persen penduduknya mengalami gangguan kesakitan dalam sebulan terakhir. Sementara itu, angka kesakitan tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango, dimana terdapat sekitar 27,47 persen penduduknya yang mengalami gangguan kesehatan selama sebulan terakhir.

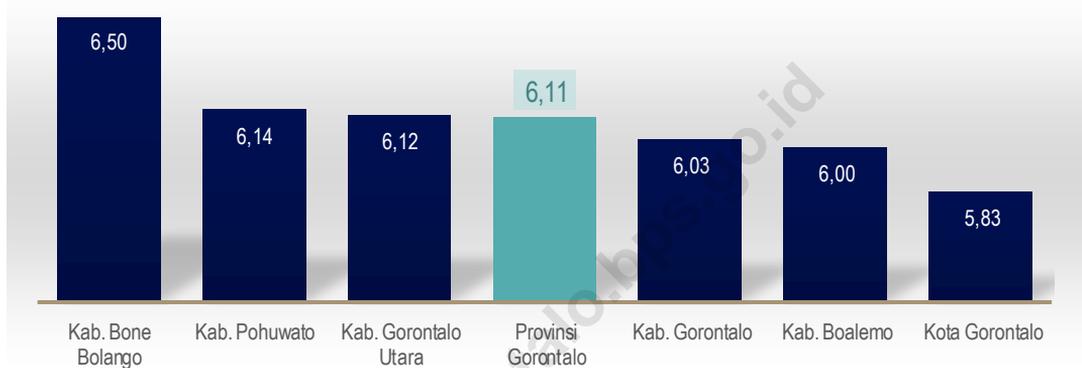
Gambar 2.3 Angka Kesakitan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (persen), 2016



Sumber: Susenas, BPS Provinsi Gorontalo

Hasil Susenas pada Maret 2016 menunjukkan bahwa secara umum penduduk Gorontalo yang mengalami gangguan kesehatan (sakit) rata-rata sakit selama 6 hingga 7 hari. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, lama sakit penduduk Kota Gorontalo relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain, yaitu sekitar 5 hingga 6 hari.

Gambar 2.4 Rata-rata Lama Sakit Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (hari), 2016

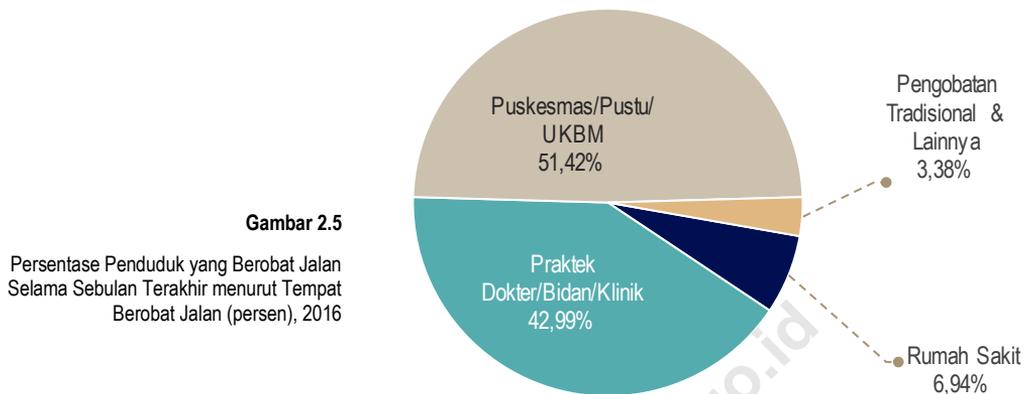


Sumber: Susenas, BPS Provinsi Gorontalo

2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang baik dan bermutu merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas kesehatan. Ketersediaan tersebut juga harus dibarengi dengan tingkat pemanfaatannya. Jika fasilitas layanan kesehatan sudah tersedia namun belum dimanfaatkan secara maksimal, maka tidak akan terlalu berpengaruh dalam peningkatan kualitas kesehatan. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur fasilitas kesehatan juga perlu dibarengi dengan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya fasilitas kesehatan tersebut.

Secara umum, tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan di Gorontalo sudah cukup tinggi. Dari hasil Susenas Maret 2016 menunjukkan bahwa hanya sekitar 1,47 persen penduduk yang masih menggunakan praktek pengobatan tradisional. Puskesmas/Pustu merupakan fasilitas kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan oleh penduduk Gorontalo (49,06%) sebagai tempat berobat jalan. Setelah puskesmas/pustu, praktek dokter/bidan menjadi salah satu alternatif fasilitas kesehatan yang sering dimanfaatkan oleh penduduk Gorontalo sebagai tempat berobat jalan.

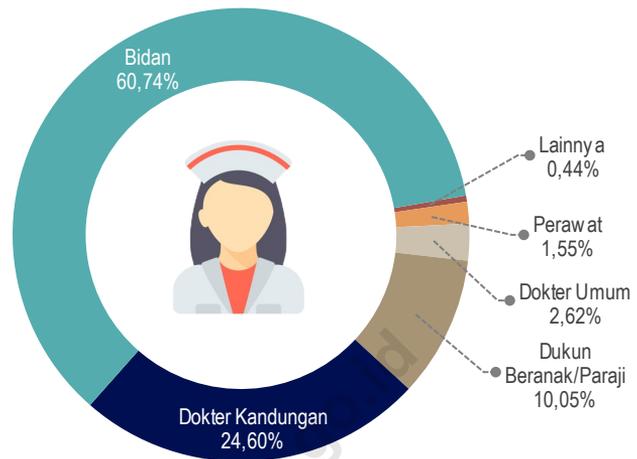


Sumber: Susenas Maret 2016 (diolah), BPS Provinsi Gorontalo

Selain pemanfaatan fasilitas kesehatan, tingkat pemanfaatan tenaga medis sebagai penolong kelahiran terakhir juga tidak kalah penting. Peralnya, variabel tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat angka kematian bayi di suatu daerah. Dengan memanfaatkan tenaga medis sebagai penolong kelahiran terakhir, maka diharapkan akan dapat mengurangi tingkat kematian bayi dan ibu. Tenaga medis dianggap lebih paham dan higienis dalam penanganan persalinan dibandingkan tenaga non medis, sehingga resiko kematian bayi dan ibu saat persalinan dapat berkurang. Oleh sebab itu pemerintah berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan telah memperlihatkan kemajuan. Hasil Susenas Maret 2016 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 89,86 wanita pernah kawin usia 15-49 tahun di Gorontalo yang proses persalinannya dibantu oleh tenaga kesehatan. Sementara itu, sebanyak 10,14 persen ditolong oleh selain tenaga kesehatan. Tenaga medis yang paling banyak dipilih untuk proses persalinan di Gorontalo adalah Bidan (60,73%). Meskipun demikian, hingga sekarang masih terdapat sekitar 10,05 persen wanita yang menggunakan jasa dukun beranak/paraji sebagai penolong proses persalinan mereka.

Gambar 2.6
Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir Dalam 2 Tahun Terakhir (persen), 2016



Sumber: Susenas, BPS Provinsi Gorontalo

2.3 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Kurang gizi merupakan salah satu ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu daerah. Hal ini dapat menjadi masalah karena adanya beban jumlah anak kurang gizi yang cukup besar. Sejalan dengan hal itu, ibu yang sedang mengandung harus mulai memerhatikan asupan yang dimakan dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal itu merupakan gizi dan imunisasi awal bagi seorang anak.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi pada bayi. Komposisi yang terkandung di dalam ASI menunjang tumbuh kembang bayi karena mengandung antibodi alami yang dapat membantu dalam mencegah infeksi dan gangguan kesehatan pada bayi. ASI mudah dicerna karena selain mengandung zat gizi yang sesuai, juga mengandung enzim-enzim untuk mencernakan zat gizi yang terdapat dalam ASI tersebut. Zat gizi yang terkandung dalam bayi berkualitas tinggi dan berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Data persentase anak usia kurang dari 2 tahun yang pernah diberi ASI bertujuan mengetahui berapa persen anak-anak usia 0 tahun hingga hampir 2 tahun (0-23 bulan) yang pernah disusui. Berdasarkan hasil Susenas 2016 di Provinsi Gorontalo, anak usia dibawah 2 tahun yang pernah disusui ada sebanyak 90,71 persen.

Meskipun ASI dianggap penting dan sangat bermanfaat untuk bayi, rata-rata lama pemberian ASI di Provinsi Gorontalo masih rendah. Di samping itu, rata-rata lama pemberian ASI di Provinsi Gorontalo selama 9,71 bulan. Di antara anak usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI, sebanyak 61,66 persen diberikan ASI kurang dari 12 bulan. Angka ini jauh di bawah angka anjuran kesehatan, dimana seharusnya seorang anak diberikan ASI selama 24 bulan.

Tabel 2.1

Persentase Anak Usia 0-23 Bulan yang Pernah Diberi ASI menurut Rata-rata Lama Pemberian ASI (bulan) dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (persen), 2016

Kab/Kota	Lama Pemberian ASI (Bulan)				Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan)
	< 12	12 - 15	16 - 19	20 - 23	
Kab. Boalemo	60,12	13,51	15,16	11,2	10,36
Kab. Gorontalo	59,92	12,75	13,12	14,2	10,43
Kab. Pohuwato	58,79	21,99	10,19	9,03	9,86
Kab. Bone Bolango	62,15	15,52	10,92	11,42	9,91
Kab. Gorontalo Utara	71,37	13,07	11,82	3,74	8,23
Kota Gorontalo	61,3	23,28	11,55	3,87	8,55
Provinsi Gorontalo	61,66	16,2	12,3	9,84	9,71

Sumber: Susenas, BPS Provinsi Gorontalo

Di samping pemberian ASI, pemberian imunisasi juga penting untuk menjaga kesehatan bayi dan balita. Imunisasi disebut juga dengan vaknisasi. Imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh dengan tujuan memberikan kekebalan terhadap suatu penyakit. Imunisasi bayi dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan usia bayi. Tujuan pemberian imunisasi dasar yang lengkap pada bayi adalah melindungi bayi dari segala penyakit yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, atau bahkan kematian bayi.

Terdapat dua jenis imunisasi yaitu imunisasi wajib dan imunisasi tambahan (dianjurkan). Pemerintah mewajibkan lima jenis vaksinasi wajib pada bayi/anak. Lima jenis vaksinasi tersebut meliputi BCG, Polio, Hepatitis B, DPT, dan Campak. Menurut WHO, kelima jenis imunisasi tersebut diwajibkan karena dampak atau pengaruh dari penyakit tersebut dapat menyebabkan kecacatan hingga kematian. Sementara jenis imunisasi tambahan dianjurkan untuk menambah daya tahan tubuh terhadap beberapa jenis penyakit. Vaksin imunisasi tambahan meliputi Hib, Pneumokokus (PCV), Influenza, MMR, Tifoid, Hepatitis A, Varisela, dan HPV.

Gambar 2.7 Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Kabupaten/Kota (persen), 2016



Sumber: Susenas, BPS Provinsi Gorontalo

Di Provinsi Gorontalo, balita yang sudah mendapat imunisasi lengkap sebanyak 66,65 persen. Berdasarkan kabupaten/kota, 80,65 persen balita yang berada di Kota Gorontalo sudah melakukan imunisasi lengkap. Hal ini dipengaruhi oleh akses terhadap fasilitas kesehatan di kota lebih mudah dibanding kabupaten lain. Sementara Kabupaten Pohuwato, balita yang sudah memperoleh imunisasi lengkap ada sekitar 49,7 persen.

<https://gorontalo.bps.go.id>

PENDIDIKAN | 3



PENDIDIKAN

3

Dalam proses pembangunan, pendidikan memiliki peranan yang strategis. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup sehat dan berumur panjang. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia yang merupakan sumber daya tenaga kerja penggerak pembangunan. Dengan tenaga kerja yang berkualitas, maka pembangunan yang dicapai pun akan berkualitas.

Di Indonesia, pentingnya pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, pemerintah menjamin hak setiap warga negara untuk menikmati pendidikan yang layak demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan amanat tersebut. Besarnya alokasi dana yang dipergunakan untuk pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

3.1 Perkembangan Capaian Pendidikan di Indonesia

Mengingat akan pentingnya peran pendidikan dalam pembangunan, maka pendidikan harus dapat dirasakan merata oleh setiap penduduk di seluruh penjuru tanah air. Pendidikan dilaksanakan tanpa memandang aspek suku, agama, wilayah, tingkat ekonomi, gender, dan lain sebagainya. Dengan begitu, ketimpangan pendidikan diharapkan tidak terjadi di kalangan masyarakat.

Nyatanya, saat ini kondisi pendidikan di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan pencapaian pendidikan. Capaian pendidikan penduduk Indonesia dapat diukur dengan melihat rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas yang menjadi salah satu indikator dalam IPM. Ketimpangan capaian rata-rata lama sekolah tersebut akan dilihat melalui beberapa sudut pandang, seperti menurut jenis kelamin, atau menurut provinsi.

Selama enam tahun terakhir (2010-2016), rata-rata lama sekolah di Indonesia menunjukkan capaian yang meningkat. Secara rata-rata, lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia meningkat dari 7,46 tahun di 2010 menjadi 7,95 tahun di 2016. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, capaian rata-rata lama sekolah penduduk perempuan tercatat jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki. Meskipun demikian, selama periode 2010-2016 kenaikan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan sedikit lebih cepat dibandingkan laki-laki. Pada periode tersebut, rata-rata lama sekolah perempuan meningkat 0,46 tahun, sementara rata-rata lama sekolah laki-laki meningkat 0,43 tahun. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut telah terjadi perbaikan kesenjangan capaian tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 3.1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin di Indonesia (tahun), 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

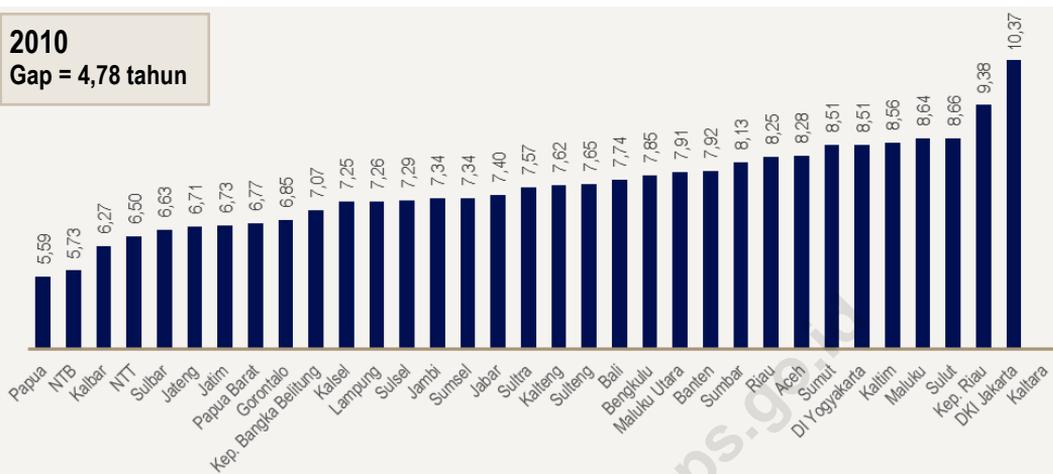
Jika dilihat berdasarkan provinsi, jelas terlihat adanya variasi yang cukup tinggi dalam pencapaian tingkat pendidikan antarprovinsi di Indonesia. Pada tahun 2016, rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di DKI Jakarta telah bersekolah selama 10,88 tahun atau setara kelas I SMA. Pada periode yang sama, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Papua baru mencapai 6,15 tahun atau setara dengan SD.

Meskipun masih tinggi, namun gap antara capaian rata-rata lama sekolah terendah dan tertinggi mulai mengecil dalam kurun 2010-2016. Pada tahun 2010, terjadi gap rata-rata lama sekolah sebesar 4,78 tahun, sementara di tahun 2016 gap tersebut mengecil menjadi 4,73 tahun.

Gambar 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas menurut Provinsi (Tahun), 2010 dan 2016

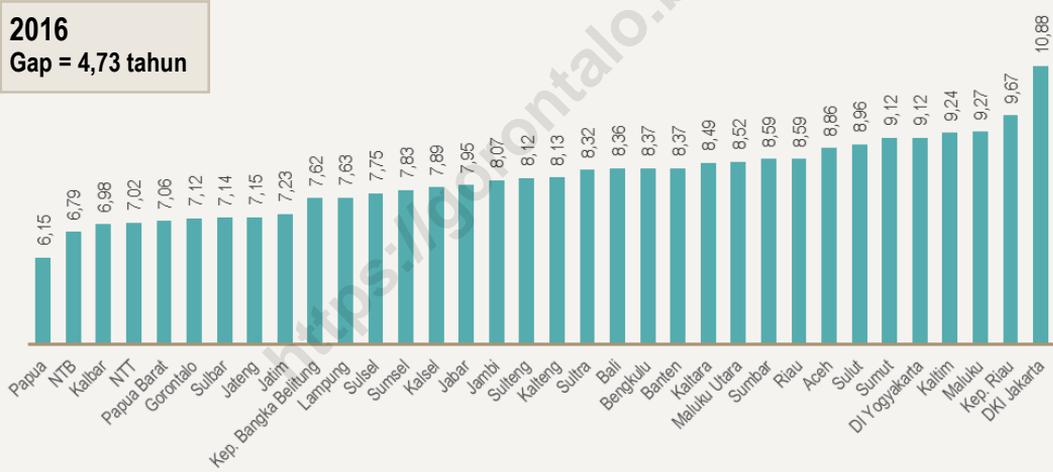
2010

Gap = 4,78 tahun



2016

Gap = 4,73 tahun



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

3.1 Perkembangan Tingkat Pendidikan di Gorontalo

Secara umum, tingkat pendidikan di Gorontalo masih relatif rendah. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Gorontalo baru mencapai 7,12 tahun atau setara dengan kelas I SMP, masih di bawah capaian rata-rata nasional. Pada periode yang sama, capaian rata-rata lama sekolah nasional telah mencapai 7,95 tahun atau setara dengan kelas II SMP. Capaian rata-rata lama sekolah Gorontalo pun masih menempati posisi enam terbawah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Meskipun masih jauh dari target, capaian rata-rata lama sekolah Gorontalo selalu meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan rata-rata lama sekolah Gorontalo dalam kurun 2010-2016 menunjukkan kecepatan yang bervariasi. Kecepatan pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode 2014-2015 dengan pertumbuhan sebesar 1,13 persen. Sementara pertumbuhan terendah terjadi pada periode 2013-2014 yaitu sebesar 0,14 persen.

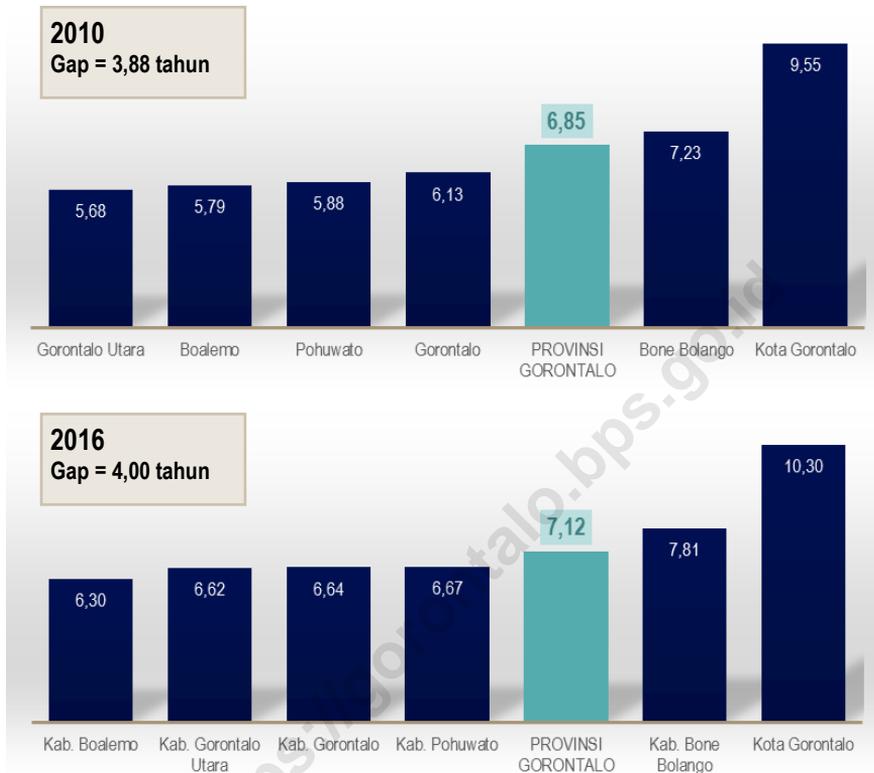
Gambar 3.3 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Provinsi Gorontalo (tahun) dan Pertumbuhannya (persen), 2010-2016



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Pertumbuhan rata-rata lama sekolah terjadi di semua kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Namun, kecepatan pertumbuhan antar kabupaten/kota menunjukkan variasi yang cukup tinggi. Bahkan, kesenjangan antarwilayah terlihat melebar dalam kurun 2010-2016, dimana gap antara capaian terendah dan tertinggi meningkat dari 3,88 tahun pada 2010 menjadi 4,00 pada 2016. Kabupaten Gorontalo Utara yang pada tahun 2010 memiliki capaian rata-rata lama sekolah terendah, pada tahun 2016 bertukar posisi dengan Kabupaten Boalemo. Kondisi ini terjadi karena dalam kurun waktu tersebut rata-rata lama sekolah Kabupaten Gorontalo Utara secara rata-rata tumbuh lebih cepat dibandingkan Kabupaten Boalemo. Sementara Kota Gorontalo, meskipun pertumbuhan rata-rata lama sekolahnya tidak secepat kabupaten lain, namun sejak 2010 capaiannya sudah yang tertinggi. Oleh karenanya, diperlukan usaha ekstra dari kabupaten lain untuk dapat mengejar capaian Kota Gorontalo.

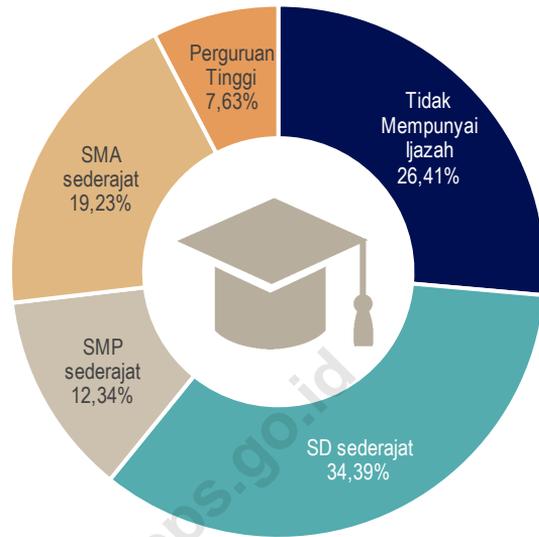
Gambar 3.4 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (Tahun), 2010 dan 2016



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat pendidikan di suatu daerah adalah persentase penduduk menurut ijazah tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di suatu daerah, menunjukkan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembangunan pendidikannya.

Di Gorontalo sendiri, pada tahun 2016 sekitar sepertiga dari penduduk 15 tahun ke atas di Gorontalo tercatat sebagai lulusan Sekolah Dasar (SD) sederajat. Selain itu, masih terdapat juga sekitar 26,41 persen penduduk 15 tahun ke atas yang bahkan tidak mempunyai ijazah. Hanya sekitar 7,63 persen yang merupakan lulusan perguruan tinggi.



Gambar 3.5

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2016

Sumber: Susenas Maret 2016 (diolah), BPS Provinsi Gorontalo

Relatif rendahnya tingkat Pendidikan di Gorontalo juga tercermin dari capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS dapat dijadikan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS, semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Hal ini dipengaruhi pula oleh budaya dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Secara umum, partisipasi sekolah di Gorontalo pada kelompok umur 7-12 tahun cukup tinggi, namun semakin berkurang pada kelompok umur yang lebih tinggi. Pada kelompok umur 7-12 tahun APS di Gorontalo tahun 2016 adalah sebesar 98,99 persen. Artinya, hanya sekitar 1,01 persen penduduk pada kelompok umur ini yang belum mengenyam pendidikan. Selanjutnya, pada kelompok umur 13-15 tahun APS tercatat sebesar 91,97 persen, dan terus mengecil hingga hanya mencapai 62,80 persen pada kelompok umur 16-18 tahun. Ini mengindikasikan bahwa banyak penduduk Gorontalo yang bersekolah pada kelompok umur 7-12 tahun dan mulai putus sekolah pada kelompok umur berikutnya.

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis Kelamin		Kelompok Umur		
		7 - 12	13 - 15	16 - 18
Perkotaan				
	Laki-laki	98,99	91,97	62,80
	Perempuan	99,48	97,35	76,25
	Laki-laki + Perempuan	99,23	94,69	68,28
Perdesaan				
	Laki-laki	98,31	84,97	63,82
	Perempuan	98,62	93,34	75,48
	Laki-laki + Perempuan	98,46	88,96	69,54
Perkotaan dan Perdesaan				
	Laki-laki	98,53	87,38	63,44
	Perempuan	98,91	94,83	75,71
	Laki-laki + Perempuan	98,71	91,01	69,12

Tabel 3.1

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Gorontalo (persen), 2016

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun tingkat partisipasi sekolah di Gorontalo masih tinggi, yaitu pada kisaran 90 persen. Namun, pada kelompok umur 16-18 tahun APS mulai jauh berkurang. Pada kelompok umur ini APS tercatat sebesar 62,80 persen. Artinya sekitar sepertiga penduduk Gorontalo pada kelompok umur tersebut belum pernah mengenyam pendidikan.

Meskipun tidak terlalu jauh, namun masih terjadi kesenjangan partisipasi sekolah antara penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan perdesaan. Terlihat dari nilai APS penduduk di daerah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan penduduk di daerah perdesaan. Artinya, penduduk yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak yang bersekolah dibandingkan di daerah perdesaan. Kesenjangan APS antara penduduk daerah perkotaan dan perdesaan sangat jelas terlihat mulai pada kelompok umur 16-18 tahun. Pada kelompok umur tersebut, APS daerah perkotaan mencapai 81,47 persen, sementara daerah perdesaan hanya mencapai 62,05 persen. Ketimpangan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah akses terhadap fasilitas pendidikan. Akses terhadap fasilitas pendidikan di daerah perkotaan tentu berbeda dengan di perdesaan. Di perkotaan, akses terhadap fasilitas pendidikan, seperti sekolah dan guru, cenderung lebih mudah dibandingkan di daerah perdesaan. Oleh karenanya, perlu pemerataan fasilitas pendidikan masih perlu diupayakan untuk mempermudah akses penduduk dalam mengenyam pendidikan.

3.3 Ketimpangan Lama Sekolah Antarindividu di Gorontalo

Ketimpangan capaian tingkat pendidikan antarindividu dapat diukur dengan Indeks Gini yang dihitung untuk capaian lama sekolah setiap penduduk. Indeks Gini Pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pemerataan pendidikan. Menurut Todaro (Todaro, 2000), Indeks Gini berkisar antara 0 (kemerataan sempurna) dan 1 (ketidakmerataan atau ketimpangan sempurna). Lebih jelas lagi, kriteria tersebut dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu: indeks gini lebih dari 0,70 (ketimpangan sangat tinggi); indeks gini 0,50-0,70 (ketimpangan tinggi); indeks gini 0,36-0,49 (ketimpangan sedang); indeks gini 0,20-0,35 (ketimpangan rendah); dan indeks gini kurang dari 0,2 (ketimpangan sangat rendah).

Secara umum, tingkat pendidikan antarindividu di Gorontalo memiliki tingkat ketimpangan yang rendah. Tercatat, Indeks Gini Pendidikan Gorontalo yang dihitung dari data Susenas Maret 2016 adalah sebesar 0,302. Artinya, secara umum penduduk usia 25 tahun ke atas di Gorontalo memiliki tingkat pendidikan yang relatif homogen, dimana rata-rata mereka bersekolah selama 7,12 tahun.

Kemerataan tingkat pendidikan terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Tidak ada ketimpangan pendidikan yang berarti antara penduduk yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dari sumber data yang sama, indeks gini pendidikan dari penduduk yang tinggal daerah perkotaan adalah sebesar 0,291, sementara untuk penduduk yang tinggal di daerah perdesaan memiliki indeks gini pendidikan sebesar 0,295.

Begitu pula jika dibandingkan menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Gorontalo menunjukkan ketimpangan yang cukup rendah. Dari data Susenas Maret 2016 menunjukkan bahwa indeks ketimpangan pendidikan pada penduduk laki-laki adalah sebesar 0,314, sedangkan pada penduduk perempuan sebesar 0,290.

Tabel 3.2
Indeks Gini Lama Sekolah Penduduk Usia 25
Tahun ke Atas menurut Klasifikasi Tempat
Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi
Gorontalo, 2016

Rincian	Indeks Gini Pendidikan	
	Klasifikasi Wilayah	Perkotaan
Perdesaan		0,291
Jenis Kelamin	Laki-laki	0,314
	Perempuan	0,290

Sumber: Susenas Maret 2016 (diolah), BPS Provinsi Gorontalo

<https://gorontalo.bps.go.id>

KETENAGAKERJAAN | 4

<https://gubantalo.bps.go.id>



KETENAGAKERJAAN 4

Tenaga kerja berkualitas merupakan modal kuat dalam pembangunan suatu daerah. Bonus Demografi yang sedang dinikmati Gorontalo dapat menjadi peluang yang bagus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang jika didukung dengan tenaga kerja yang berkualitas. Oleh karenanya, diperlukan informasi beberapa indikator mengenai ketenagakerjaan untuk melihat gambaran kondisi tenaga kerja. Beberapa indikator ketenagakerjaan dapat dihasilkan dari survei rutin yang dilaksanakan oleh BPS tiap semester, yaitu Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Hasil Sakernas Agustus 2016 menunjukkan bahwa terdapat 546.668 penduduk Gorontalo yang berstatus bekerja. Sebaliknya, pada periode yang sama jumlah penganggur mengalami penurunan dari 24.101 orang menjadi 15.528 orang.

Jenis Kegiatan	2015	2016
Angkatan Kerja	517 788	562 196
Bekerja	493 687	546 668
Pengangguran	24 101	15 528
Bukan Angkatan Kerja	295 718	265 935
Sekolah	78 825	75 928
Mengurus Rumah Tangga	185 526	168 119
Lainnya	31 367	21 888
Total Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas	813 506	828 131

Tabel 4.1

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu (orang), 2015-2016

Sumber: Sakernas, BPS Provinsi Gorontalo

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja sendiri didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Lewat TPAK dapat diperoleh gambaran mengenai besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia di suatu wilayah untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pada tahun 2016, TPAK Gorontalo tercatat sebesar 67,89 persen. Artinya, dari 100 penduduk Gorontalo usia 15 tahun ke atas terdapat sekitar 67 penduduk yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Angka ini meningkat jika dibandingkan 2015 yang sebesar 63,65 persen. Dengan TPAK yang meningkat menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja yang tersedia di Gorontalo semakin meningkat pula.

TPAK penduduk laki-laki di Gorontalo hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan TPAK penduduk perempuan. Ini berarti pasokan tenaga kerja laki-laki yang tersedia di Gorontalo hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan tenaga kerja perempuan. Hasil Sakernas 2016 menyebutkan bahwa lebih dari setengah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam angkatan kerja adalah laki-laki. Sementara itu, hampir tiga per empat dari kelompok bukan angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan. Secara umum, mereka yang masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga.

Jenis Kegiatan	Satuan	Laki-laki	Perempuan	Total
Angkatan Kerja	Jiwa	340 335	221 861	562 196
Bekerja	Jiwa	332 847	213 821	546 668
Pengangguran	Jiwa	7 488	8 040	15 528
Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	70 154	195 781	265 935
Sekolah	Jiwa	33 825	42 103	75 928
Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	23 147	144 972	168 119
Lainnya	Jiwa	13 182	8 706	21 888
Total Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas	Jiwa	410 489	417 642	828 131
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	82,91	53,12	67,89
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,20	3,62	2,76

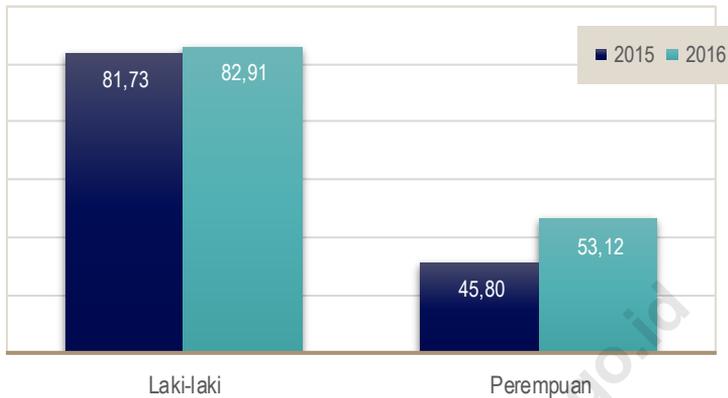
Tabel 4.2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2016

Sumber: Sakernas, BPS Provinsi Gorontalo

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, TPAK di tahun 2016 baik laki-laki maupun perempuan, keduanya mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, TPAK laki-laki tercatat sebesar 82,91 persen, meningkat dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 81,73 persen. Hal yang sama juga terjadi pada TPAK perempuan, dimana pada tahun 2015 TPAK perempuan adalah sebesar 45,80 persen meningkat menjadi 53,12 persen di tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjadi penambahan pasokan tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan di tahun 2016.

Gambar 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo (persen), 2015-2016



Sumber: Sakernas, BPS Provinsi Gorontalo

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terdiri dari mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha/tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

TPT di Gorontalo pada tahun 2016 mengalami penurunan. Jika pada tahun 2015 TPT Gorontalo tercatat sebesar 4,65 persen, di tahun 2016 menurun menjadi 2,76 persen. TPT sebesar 2,76 persen memiliki arti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), 2 hingga 3 orang diantaranya merupakan pengangguran atau tidak terserap dalam pasar kerja. Tidak terserapnya tenaga kerja tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti sempitnya lapangan kerja atau rendahnya kualitas tenaga kerja sehingga sulit untuk berkompetisi dalam pasar kerja.

Secara umum, TPT di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan di daerah perkotaan. Pada tahun 2016 TPT perdesaan sebesar 2,05 persen, sedangkan di daerah perkotaan mencapai 3,94 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesempatan kerja di daerah perkotaan lebih terbatas dibandingkan daerah perdesaan sehingga tidak mampu menyerap semua angkatan kerja yang tersedia. Selain itu, lapangan kerja yang tersedia di daerah perkotaan umumnya didominasi oleh sektor ekonomi yang mengutamakan tingkat

sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak daripada sektor lainnya. Selain itu, sektor ini juga tidak menuntut tingkat pendidikan yang tinggi sehingga lebih fleksibel dalam menampung angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan rendah.

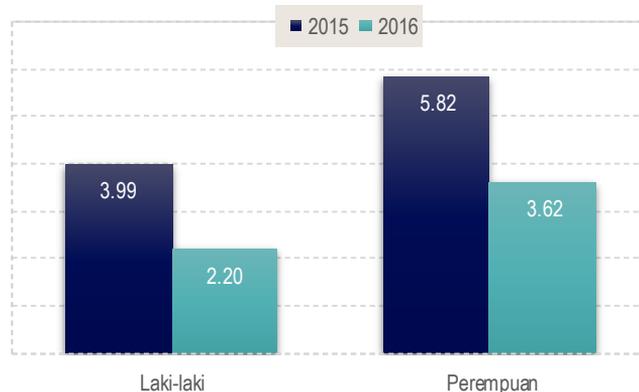
Gambar 4.2 Tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tipe Daerah Tempat Tinggal (persen), 2015-2016



Sumber: Sakernas, BPS Provinsi Gorontalo

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara umum proporsi penduduk perempuan yang menganggur lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hasil Sakernas 2016 menunjukkan bahwa TPT perempuan lebih tinggi (3,62 %) dibandingkan laki-laki (2,20 %). Artinya, dari 100 angkatan kerja di Gorontalo, terdapat 3 hingga 4 perempuan yang tidak terserap di pasar kerja. Sementara laki-laki, hanya sekitar 2 hingga 3 di antara angkatan kerja adalah pengangguran.

Gambar 4.3 Tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin (persen), 2015-2016



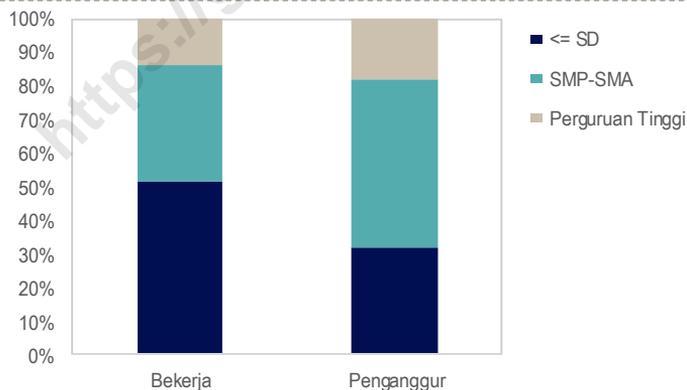
Sumber: Sakernas, BPS Provinsi Gorontalo

4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki peranan penting dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Semakin tinggi pendidikan biasanya semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan tidak semua tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dapat terserap. Sebagian besar lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang Pendidikan yang telah ditamatkan. Akibatnya, banyak ditemui pengangguran dengan pendidikan tinggi terutama di daerah perkotaan.

Tingkat pendidikan angkatan kerja di Gorontalo masih relatif rendah. Sebagian besar diantaranya bahkan tidak pernah sekolah dan belum tamat Sekolah Dasar (SD). Pada tahun 2016, lebih dari setengah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di Gorontalo hanya lulusan SD ke bawah. Sementara itu, sepertiga diantaranya merupakan lulusan pendidikan menengah (SMP dan SMA) dan hanya sekitar 14,07 persen sisanya yang merupakan lulusan perguruan tinggi.

Gambar 4.4 Jumlah Angkatan Kerja menurut Jenis Kegiatan dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2015-2016

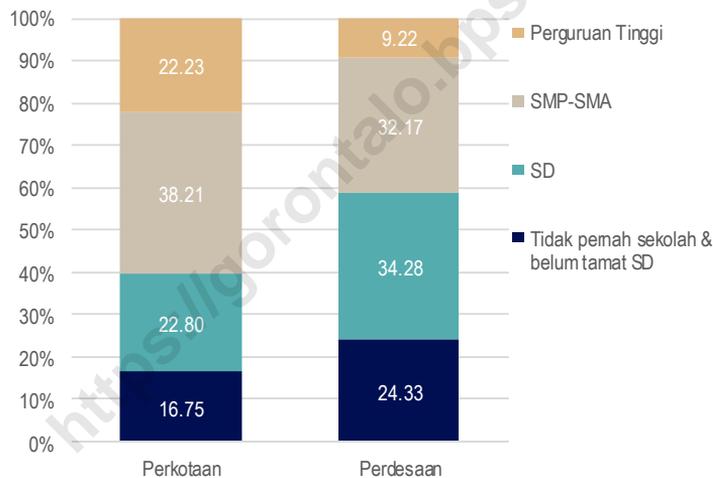


Sumber: Sakernas, BPS Provinsi Gorontalo

Menariknya, jika pada kelompok orang yang bekerja sebagian besar merupakan lulusan SD ke bawah, pada kelompok penganggur, justru sebagian besar diantaranya merupakan lulusan pendidikan menengah (SMP dan SMA). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang terserap di Gorontalo sebagian besar bukan merupakan tenaga kerja terdidik. Hal ini wajar, dimana lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Gorontalo adalah sektor pertanian, dimana pada sektor ini tidak menuntut tingkat pendidikan yang tinggi.

Tingkat pengangguran di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena jenis lapangan pekerjaan di daerah perdesaan biasanya tidak banyak mensyaratkan jenjang pendidikan yang tinggi—seperti sektor pertanian, pertambangan dan penggalian—sehingga lebih banyak tenaga kerja yang dapat terserap. Lebih dari setengah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di daerah perdesaan merupakan lulusan SD ke bawah. Sementara di daerah perkotaan, persinya hanya mencapai 39,55 persen. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di daerah perkotaan didominasi oleh mereka yang menamatkan pendidikan SMA ke atas.

Gambar 4.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah Tempat Tinggal (persen), 2016



Sumber: Sakemas, BPS Provinsi Gorontalo

4.3 Lapangan Kerja dan Status Pekerjaan

Hingga kini, sektor pertanian masih menjadi pondasi perekonomian Gorontalo. Peralannya, selain sebagai penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Gorontalo. Tercatat, dalam kurun lima tahun terakhir, sekitar lebih dari sepertiga tenaga kerja di Gorontalo bekerja pada sektor pertanian. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan yang mampu menyerap tenaga kerja mencapai 18,54 persen.

Gambar 4.6 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama (persen), 2013-2016

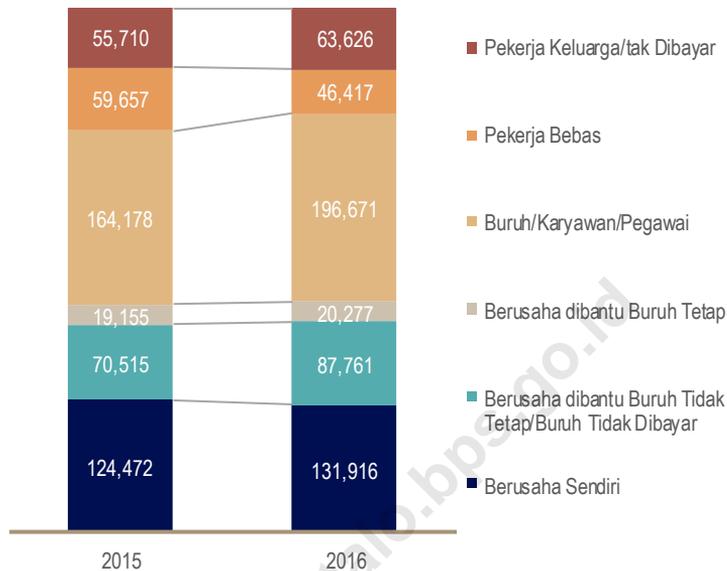


Sumber: Sakernas, BPS Provinsi Gorontalo

Sektor berikutnya dengan penyerapan tenaga kerja yang juga cukup besar di Gorontalo adalah Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi. Dalam kurun enam tahun terakhir, geliat sektor ini dalam perekonomian Gorontalo mulai terlihat. Dalam kurun yang sama, sumbangannya terhadap PDRB cenderung meningkat. Begitu pula peranannya dalam penyerapan tenaga kerja di Gorontalo. Sektor ini mampu menyerap satu dari enam pekerja yang ada di Gorontalo.

Berdasarkan status pekerjaan, sekitar sepertiga orang yang bekerja di Gorontalo berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Bahkan, persentasenya pada tahun 2016 (35,98%) meningkat dibandingkan tahun 2015 (33,26%). Berikutnya, diikuti oleh yang berstatus berusaha sendiri, dimana pada tahun 2016 persentasenya mencapai 24,13 persen. Sementara itu, pada periode yang sama, penduduk 15 tahun ke atas yang berusaha dibantu buruh tetap masih memiliki persentase terendah yaitu hanya sekitar 3,71 persen.

Gambar 4.7 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan (orang), 2015-2016



Sumber: Sakernas, BPS Provinsi Gorontalo

4.4 Jumlah Jam Kerja

Salah satu indikator untuk mengetahui jumlah pekerja paruh waktu dan setengah penganggur adalah dengan melihat jumlah jam kerjanya dalam seminggu yang lalu. Seorang pekerja dikategorikan sebagai pekerja paruh waktu jika bekerja di bawah jam normal (kurang dari 35 jam) tetapi tidak mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sementara yang masuk dalam kategori setengah penganggur adalah mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja di bawah normal (kurang dari 35 jam) dan di saat yang sama masih mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Pada tahun 2016, masih terdapat sekitar 25,65 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Gorontalo yang bekerja di bawah jam kerja normal. Angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 28,43 persen.

Tabel 4.3
Penduduk Usia 15 Tahun ke
Atas yang Bekerja menurut
Jumlah Jam Kerja Provinsi
Gorontalo, 2015-2016

Jam Kerja Seluruhnya	2015		2016	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1 - 7	7.704	1,56	10.513	1,92
8 - 14	21.621	4,38	36.288	6,64
15 - 24	53.885	10,91	42.048	7,69
25 - 34	57.134	11,57	51.393	9,40
0 dan 35 +	353.343	71,57	406.426	74,35
Total	493.687	100,00	546.668	100,00

Sumber: Sakernas, BPS Provinsi Gorontalo

<https://gorontalo.bps.go.id>

<https://gornontalo.bps.go.id>

POLA KONSUMSI | 5



POLA KONSUMSI

5

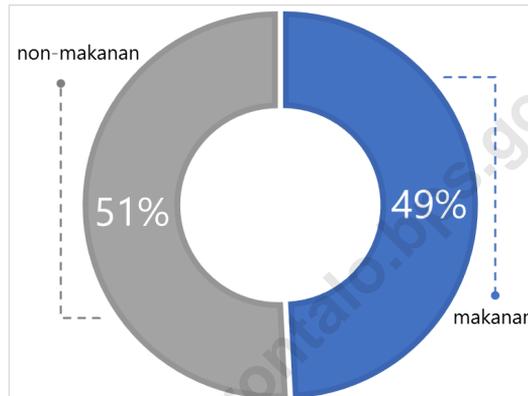
Tingkat kesejahteraan dapat diukur melalui tingkat pendapatan rumah tangga. Hingga kini, data mengenai pendapatan rumah tangga masih sulit didapatkan. Oleh karenanya, diperlukan suatu proksi untuk mengukur tingkat pendapatan rumah tangga. Secara teori ekonomi, tingkat pendapatan dapat didekati dengan tingkat pengeluaran. Total pengeluaran akan sejalan dengan total pendapatan. Rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang tinggi biasanya memiliki tingkat pengeluaran rumah tangga yang tinggi pula. Begitu pula sebaliknya, rumah tangga dengan tingkat pendapatan rendah, total pengeluarannya pun rendah.

5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

BPS mengklasifikasikan pengeluaran rumah tangga menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran makanan dan bukan makanan. Teori Engel's Law menjelaskan bahwa setiap rumah tangga memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda pada kedua kelompok pengeluaran tersebut. Rumah tangga dengan pengeluaran yang sedikit lebih mementingkan kebutuhan makanan daripada kebutuhan bukan makanan. Porsi pengeluaran untuk makanan akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya pendapatan. Artinya, pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi maka pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan bukan makanan justru lebih besar dibandingkan makanan.

Pemenuhan kebutuhan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan dan perumahan pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi jauh lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dijadikan proksi untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk dengan melihat komposisi kelompok pengeluarannya.

Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Provinsi Gorontalo, 2016

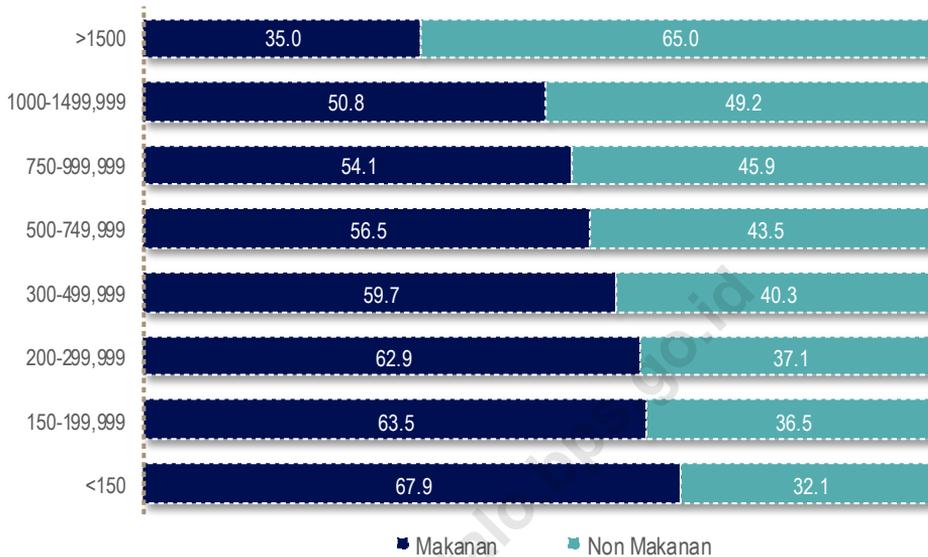


Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Susenas 2016 menunjukkan secara umum pengeluaran non makanan penduduk Gorontalo didominasi oleh pengeluaran non makanan. Pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Gorontalo selama sebulan tercatat sebesar Rp774.525. Dari rata-rata total pengeluaran tersebut, 49,18 persen digunakan untuk pengeluaran makanan. Pengeluaran untuk kelompok bukan makanan mencapai 50,82 persen.

Jika pengeluaran diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok maka pola Teori Engel's Law dapat terlihat. Gambar 5.2 membagi pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan menjadi delapan kelompok yaitu kurang dari 150 ribu, 150-199,999 ribu, 200-299,999 ribu, 300-499,999 ribu, 500-749,999 ribu, 750-999,999 ribu, 1-1,499 juta, dan lebih besar dari 1,5 juta.

Gambar 5.2 Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Gorontalo, 2016



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa penduduk Gorontalo dengan kelompok pengeluaran kurang dari Rp150.000,- sebulan memiliki proporsi pengeluaran makanan paling tinggi dibanding kelompok pengeluaran lainnya. Penduduk pada golongan pengeluaran ini, rata-rata pengeluaran untuk kelompok makanan mencapai 67,88 persen dari total pengeluaran per kapita selama sebulan.

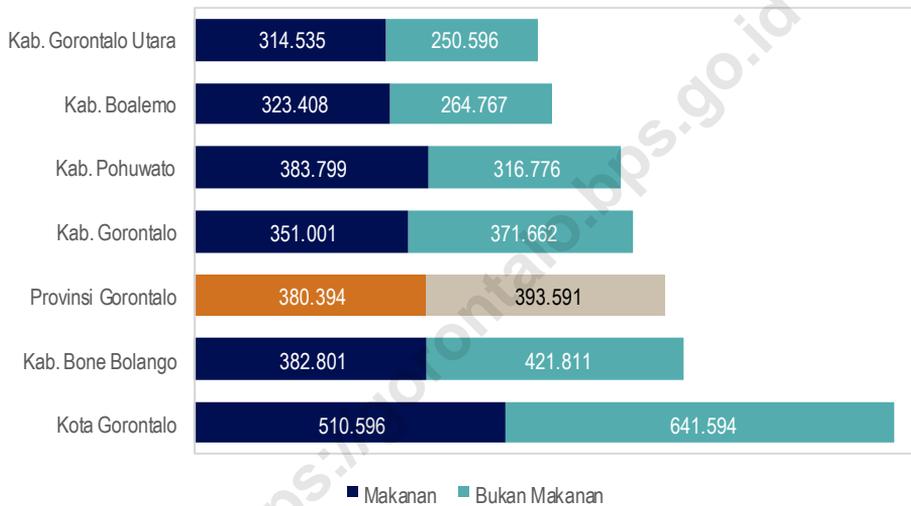
Tabel 5.1
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran di Provinsi Gorontalo (rupiah), 2016

Golongan Pengeluaran	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah
< 150 000	76.504	36.201	112.705
150 000 - 199 999	113.123	65.115	178.238
200 000 - 299 999	159.747	94.399	254.146
300 000 - 499 999	231.598	156.073	387.671
500 000 - 749 999	372.736	287.487	660.223
750 000 - 999 999	467.279	395.884	863.163
1 000 000 - 1 499 999	606.487	586.221	1.192.708
1 500 000 +	876.237	1.627.108	2.503.345

Sumber: Susenas, BPS Provinsi Gorontalo

Berdasarkan kabupaten/kota, pengeluaran penduduk Kota Gorontalo merupakan yang terbesar dibanding kabupaten lainnya di Provinsi Gorontalo. Pengeluaran rata-rata per kapita selama sebulan penduduknya mencapai Rp1.152.190,-. Sementara itu, pengeluaran penduduk Kabupaten Gorontalo Utara adalah yang terendah dengan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan sebesar Rp565.131,-.

Gambar 5.3 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (rupiah), 2016



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Jika dilihat berdasarkan proporsi kelompok pengeluaran, terdapat tiga kabupaten/kota dengan proporsi pengeluaran makanan lebih rendah dibandingkan pengeluaran untuk bukan makanan, yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo. Dari ketiga wilayah tersebut, proporsi pengeluaran makanan terendah terdapat di Kota Gorontalo, dimana penduduknya rata-rata hanya mengkonsumsi sekitar 44,32 persen dari total pengeluarannya untuk makanan.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI GORONTALO**

Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 117 Gorontalo
Telp (0435) 834596 Fax. (0435) 834597
Email: bps7500@bps.go.id
Website: Gorontalo.bps.go.id

